



**RENCANA AKSI
PROGRAM *INTERNSHIP* PEMERINTAH DAERAH KE
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2018**



I. PROGRAM

Nama Program : Program *Internship* Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan *Batch I* Tahun 2018
Tanggal Program : 16 April – 4 Mei 2018
Lokasi Program : Gdg. Radius Prawiro, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jln. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

II. PESERTA PROGRAM

Nama : **ASEP RUSLI, S.IP.**
NIP : 197311052008011004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Kasubid Pendataan
Unit Kerja : Bidang Pendataan dan Pendaftaran BPKD
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pangandaran

III. ATASAN PESERTA PROGRAM

Nama : **IDI KURNIADI, S.IP, MM**
NIP : 19710908 199901 1 001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan Dan Pendaftaran
Unit Kerja : BPKD Kabupaten Pangandaran

IV. MENTOR PROGRAM

Nama : **ARIOMA BACHTIAR, SE.MPA**
NIP. : 198504292006021001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I, (III/b)
Jabatan : AKPD Ahli Pertama
Unit Kerja : Diektorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Apakah Anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok (*silakan tulis nama anggota kelompok dalam tabel di bawah ini*)

No.	Nama Anggota Kelompok
1.	Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran
2.	Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
3.	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
4.	Kasubid Bidang Pendataan dan Pendaftaran
5.	Kasubid Bidang Penagihan dan Keberatan
6.	Fungsional Umum Bidang Pendataan dan Pendaftaran
7.	Fungsional Umum Bidang Penagihan dan Keberatan

1. Gambarkan suatu situasi atau isu dalam institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda yang mungkin dapat Anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi!
 Dalam pengelolaan pajak daerah di kabupaten pangandaran masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu :

1, Regulasi yang masih belum lengkap

- *Dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Pangandaran, baru 8 Perda yang digunakan, sedangkan 2 Perda lagi yaitu Perda tentang Pengelolaan Pajak Parkir dan Perda tentang Pengelolan Pajak Mineral Bukan Logam masih dalam proses persiapan*
- *Perbup yang ada, hanya 3 jenis pajak yaitu Perbup tentang Pajak PBB-P2, Perbup tentang Pengelolaan Pajak Hotel dan Perbup tentang Pengelolaan Pajak Restoran.*
- *Secara umum belum ada SOP tentang Pengelolaan Pajak Daerah..*

2, Database Objek Pajak Daerah yang masih belum update.

- *Belum tersedianya basis data potensi pajak daerah dan belum update-nya Database pajak Daerah.*
- *Penentuan target penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya mengacu pada potensi dan database pajak daerah yang tersedia.*
- *Pendataan objek pajak ke lapangan belum bisa dilaksanakan dengan optimal karena masih kurang nya SDM.*
- *Belum ada sistem aplikasi yang memadai untuk mengolah data subjek dan objek pajak daerah lainnya (selama ini hanya PBB yang sudah menggunakan aplikasi Sismiop).*

3, Kurang optimal dalam Pelayanan Pajak Daerah.

- *Ruangan kantor yang kurang nyaman.*
- *Peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang kurang banyak/belum mencukupi untuk semua pegawai, misal : AC, Kendaraan Operasional, PC Komputer, Laptop, Meja kursi, Lemari arsip, dll*

2. Apakah judul Rencana Aksi Anda?
Peningkatan PAD melalui Penyempurnaan Regulasi, Database dan Pelayanan Pajak Daerah.
3. Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi Anda tersebut?
 - Tersedianya dasar dalam teknis pengelolaan dan pemungutan untuk semua jenis pajak daerah.
 - Tersedianya data potensi subjek dan Objek Pajak daerah dan makin akuratnya Database Subjek dan Objek Pajak Daerah.
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan pajak daerah.
4. Uraikan bagaimana Rencana Aksi Anda memenuhi kriteria SMART!

Specific Spesifik	<i>Aktifitas spesifik apa yang akan Anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi?</i>
	<p>1. Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat rancangan regulasi tentang pengelolaan pajak daerah yang belum ada di Kabupaten Pangandaran yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Perda tentang pengelolaan Pajak Parkir 2. Rancangan Perda tentang pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 3. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak BPHTB 4. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak Reklame 5. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah 6. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak Parkir 7. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak Hiburan 8. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9. Rancangan Perbup tentang pengelolaan Pajak Penerangan Jalan • Membuat konsep SOP terkait teknis pelayanan dan pengelolaan pajak daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan kepada pimpinan untuk mengikut sertakan pegawai mengikuti bintek terkait pengelolaan pajak daerah khususnya tentang teknis pendataan potensi dan administrasi data pajak daerah lainnya. 2. Mengusulkan kepada pimpinan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan penggalian data dan updating database Pajak Daerah, misal dengan BPPT terkait perijinan, PHRI, Notaris, dll.
	<p>2. Perbaiki Pelayanan Pajak Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan anggaran kepada pimpinan untuk memenuhi fasilitas kebutuhan sarana dan prasarana terkait pelayanan pajak daerah. 2. Mengusulkan kepada pimpinan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan pelayanan Pajak Daerah, misal dengan Bank Persepsi, Notaris.

	<p>3. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB kepada pimpinan.</p>
<p>M Measurable Dapat diukur</p>	<p><i>Bagaimana Anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi? Berapa orang yang terlibat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak yang diproduksi? Berapa persentase perubahan yang dicapai?</i></p>
	<p>Pengukuran Keberhasilan Rencana Aksi :</p> <p>Jangka Pendek</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya 2 (dua) Rancangan Perda Pajak Daerah, dan 7 (tujuh) Rancangan Perbup dan konsep SOP Pelayanan Pajak Daerah. Tersedianya laporan data potensi dan ter-update-nya database pajak daerah. Tersedianya usulan anggaran sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang memadai. Tersusunnya dokumen usulan perjanjian kerjasama dengan pihak lain terkait pelayanan pajak daerah. Tersedianya usulan anggaran untuk pengadaan aplikasi Pengelola Pajak Daerah Lainnya. <p>Jangka Panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya 2 (dua) Perda Pajak Daerah, dan 7 (tujuh) Perbup dan SOP Pelayanan pajak daerah. Tersedianya sistem yang terintegrasi antara data potensi dan database pajak daerah. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang memadai. Terjalinnnya kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak lain terkait pelayanan pajak daerah. Tersedianya aplikasi pengelola pajak daerah lainnya.
	<p>Jumlah orang yang terlibat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) orang sebagai penyusun Raperda dan Raperbup (BPKD) 17 (tujuh belas) orang (pegawai BPKD bidang pengelolaan pajak daerah). 3 (tiga) orang sebagai penyusun (BPKD) 3 (tiga) orang sebagai penyusun (BPKD), Bank Persepsi dan Notaris. 3 (tiga) orang sebagai penyusun usulan (BPKD)
	<p>Waktu Yang Dibutuhkan</p> <p>Jangka Pendek</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 (enam) bulan 6 (enam) bulan 3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan 3 (tiga) bulan <p>Jangka Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 12 (dua belas) bulan 18 (delapan belas) bulan

	<ul style="list-style-type: none"> c. 12 (dua belas) bulan d. 12 (dua belas) bulan e. 12 (dua belas) bulan
	<p>Hasil yang diproduksi</p> <p>Jangka Pendek</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Rancangan Perda Pajak Daerah, 7 (tujuh) Rancangan Pebup dan Rancangan SOP dalam Pelayanan Pajak Daerah. b. Laporan Data Potensi dan laporan Database Pajak Daerah yang sudah update. c. Usulan anggaran penambahan sarana dan prasarana dalam pelayanan pajak daerah. d. Dokumen usulan perjanjian kerjasama dengan pihak lain terkait pelayanan pajak daerah e. usulan anggaran untuk pengadaan aplikasi pengelolaa pajak daerah lainnya. f. Terselenggaranya kegiatan yang mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bintek pengelolaan pajak daerah. <p>Jangka Panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Perda Pajak Daerah, dan 7 (tujuh) Perbup dan SOP Pelayanan pajak daerah. b. Sistem yang terintegrasi antara data potensi dan database pajak daerah. c. Sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang memadai. d. Kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak lain terkait pelayanan pajak daerah. e. Aplikasi pengelolaa pajak daerah lainnya. f. Tersedianya SDM yang cukup dan memadai untuk berperan aktif dalam peningkatan pengelolaan pajak daerah.
	<p>Persentase perubahan yang dicapai</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 100 % 2) 100%. 3) 50%. 4) 50% 5) 100% 6) 50%
Achievable Dapat dicapai	<p><i>Apakah alasan Anda, mengapa Anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi tersebut dapat diimplementasikan?</i></p>
	<p>Rencana aksi ini merupakan existing yang ada dan mengangkat permasalahan yang mendasar dalam pengeloaan pajak daerah sehingga perlu ditindaklanjuti agar pengeloaan pajak daerah lebih baik lagi dan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah yang lebih meningkat.</p>
Relevant Relevan	<p><i>Bagaimana relevansi Rencana Aksi Anda terhadap: (a) institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda (b) tugas pokok dan wewenang Anda, dan (c) program ini?</i></p>
	<p>Relevansi Rencana Aksi terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Institusi/Organisasi/Lingkungan Kerja</i> <p>Sangat relevan karena dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai</p>

	<p>perwujudan dari rencana kerja keuangan yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah, maka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi daerah otonom. APBD adalah wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, termasuk program kerja di BPKD Kabupaten Pangandaran yang di dalamnya merupakan program penggalan potensi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.</p> <p><i>b. Tugas pokok dan wewenang kasubid pendataan</i> Sangat relevan karena Rencana Aksi ini menuangkan dan mengangkat permasalahan yang mendasar sebagai bahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Pendataan yaitu melakukan pendataan subjek dan objek pajak daerah, membuat laporan potensi dan database objek pajak daerah, melakukan pelayanan administrasi pendaftaran wajib pajak daerah dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan yang berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>c. Program IDS</i> Sangat relevan karena Rencana Aksi ini harus dapat di implementasikan dengan baik di daerahnya masing-masing berdasarkan permasalahan yang ada dengan harapan program ini dapat dapat membantu meyelesaikan permasalahan tersebut melalui Rencana Aksi yang nyata dan berkesinambungan melalui penyelesaian jangka pendek dan janka panjang.</p>
Timely Rentang/ ketepatan waktu	<i>Mengapa waktu yang Anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi?</i>
	Karena implementasi pelaksanaan rencana aksi ini butuh rencana dan persiapan yang matang, agar apa yang dihasilkan tepat waktu dan tepat sasaran dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang lebih baik lagi.

5. Gunakan format berikut ini untuk menunjukkan:

- Kegiatan-kegiatan yang akan Anda laksanakan; dan
- Kapan Anda akan memulai dan mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut.
(Jika Rencana Aksi berkelompok tuliskan kependekan nama anggota kelompok yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan)

Nama Kegiatan	Tahap ke-1 (minggu/ bulan/ triwulan/ semester)	Tahap ke-2 (minggu/ bulan/ triwulan/ semester)	Tahap ke-3 (minggu/ bulan/ triwulan/ semester)	Tahap ke-4 (minggu/ bulan/ triwulan/ semeste)	Tahap ke-5 (minggu/ bulan/ triwulan/ semeste)
Penyempurnaan regulasi pajak Daerah dalam membuat Raperda, Raperbup dan SOP dalam Pelayanan Pajak Daerah.					
1, Rapat internal dalam penyusunan Draft Raperda,	Minggu ke 2 dan ke 3				

Raperbup dan SOP dalam Pelayanan Pajak Daerah.	<i>di Bulan Mei</i>				
2, Revisi Draft Raperda, Raperbup dan SOP dalam Pelayanan Pajak Daerah oleh Pimpinan.		<i>Minggu ke-4 di bulan Mei 2018.</i>			
3, Koreksi Draft Raperda, Raperbup dan SOP dalam Pelayanan Pajak Daerah dan pengiriman ke bagian Hukum.			<i>Minggu ke-1 di bulan Juni 2018.</i>		
4, Finalisasi Draft Raperda, Raperbup dan SOP dalam Pelayanan Pajak Daerah berdasar koreksi dari Bagian Hukum.				<i>Minggu ke-1 di bulan Juli 2018.</i>	
Penyiapan Data Potensi dan Updating Database Pajak Daerah					
1, Membuat usulan kepada pimpinan untuk menambah jumlah pegawai dalam rangka melakukan pendataan potensi dan updating database pajak daerah.	<i>Minggu ke-1 di Bulan Juli</i>				
2, Membuat usulan kepada pimpinan untuk mengikut sertakan pegawai mengikuti bintek terkait pendataan potensi dan administrasi data pajak daerah.	<i>Minggu ke-1 di Bulan Juli</i>				
3, Membuat usulan kepada pimpinan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan penggalan data dan updating database Pajak Daerah, misal dengan BPPT terkait perijinan, PHRI, Notaris dll.	<i>Minggu ke-1 di Bulan Juli</i>				
4, Mengumpulkan dan memverifikasi data potensi dan database pajak daerah yang tersedia di BPKD.		<i>Minggu ke-1 s/d ke-4 di Bulan Juli 2018</i>			
5, Menyusun data dan peta potensi dan updating database berdasarkan data dari sumber lain/pihak ketiga.			<i>Minggu ke-1 di Bulan Agustus s/d Bulan Desember 2018</i>		
Perbaikan pelayanan pajak daerah					

a, Mengusulkan anggaran kepada pimpinan untuk memenuhi fasilitas kebutuhan sarana dan prasarana terkait pelayanan pajak daerah.	<i>Minggu ke-2 di Bulan Agustus 2018.</i>				
b, Membuat usulan kepada pimpinan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan pelayanan Pajak Daerah, misal dengan Bank Persepsi, Notaris.	<i>Minggu ke-2 di Bulan Agustus 2018.</i>				
c, Mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB kepada pimpinan.	<i>Minggu ke-2 di Bulan Agustus 2018.</i>				

6. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan sumber daya tersebut?

Sumber Daya yang dibutuhkan :

- 1, Dukungan dan dorongan dari pimpinan.
- 2, SDM yang cukup dan punya kepedulian tinggi terhadap Pengelolaan Pajak Daerah.
- 3, Sarana dan psarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Pajak Daerah secara umum.
- 4, Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan pengelolaan pajak daerah.

Cara mendapatkan Sumber Daya :

1. Menyampaikan laporan dan mejelaskan rencana kerja kepada pimpinan yang bisa difahami dan dimengerti oleh pimpinan.
- 2 - Mengusulkan penambahan pegawai kepada pimpinan.
 - Mengikuti bintek dan pelatihan tentang pengelolaan Pajak Daerah.
 - Melakukan komunikasi, koordinasi serta mengajak kepada pegawai yang lainnya untuk bisa lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.
- 3, Mengusulkan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada untuk lebih meningkatkan kenyamanan dalam bekerja dan meningkatkan peayanan kepada wajib pajak.
4. Mengusulkan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam pengelolaa pajak daerah.

7. Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Anda? Bagaimana cara Anda menanggulangnya?

Kemungkinana hambatan :

- a. Dukungan pimpinan dalam menjalankan action plan yang tidak optimal.

Cara penanggulangan :

- a. Melakukan pemaparan/penjelasan terkait rencana aksi secara detail kepada pimpinan
8. Bagaimana Rencana Aksi Anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kesadaran gender (*gender awareness*), dan manajemen perubahan (*change management*)?

Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Dengan Rencana Aksi ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dapat meningkat lagi, karena hasil dari pungutan pajak daerah tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan serta mengembangkan perekonomian dan benar-benar dapat memberi peran untuk mewujudkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Kesadaran Gender (<i>gender awareness</i>)	Rencana Aksi ini diharapkan bisa berpengaruh terhadap kesadaran gender, karena dengan meningkatnya PAD, daerah dapat mengkaji lebih dalam mengenai Anggaran Responship Gender sebagai Kebijakan Publik serta memahami peranan, peluang, manfaat dan efektivitas Anggaran Responship Gender sebagai instrumen negara dalam pemenuhan hak perempuan khususnya di Kabupaten Pangandaran.
Managemen Perubahan (<i>change management</i>)	Dengan rencana aksi ini diharapkan dapat menciptakan perubahan khususnya terkait perhitungan target pajak daerah berdasarkan perhitungan potensi pajak daerah dari yang sebelumnya belum dilakukan karena belum adanya perhitungan terkait potensi pajak daerah di Kab. Pangandaran.